



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU ALWAN BASRI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 508800

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.445.000.000

1. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/37 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 415.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.355 m2/58 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 870.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.526.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



5. MOTOR, HONDA FIC02N46LO 4/7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

6. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
26.526.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	173.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	271.915.588
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.009.441.588
III. HUTANG	Rp.	337.476.329
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.671.965.259

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.